

# Bab 1

## Lembaga Keuangan Indonesia

### A. PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Perkembangan perbankan di Indonesia di kelompokkan dalam empat periode:

- a. Kondisi perbankan Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980.

Perbankan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa. Pada masa kolonial, kegiatan dirahkan untuk melayani kegiatan usaha dari pengusaha besar milik kolonial di wilayah jajahannya serta membantu administrasi anggaran milik pemerintah. Pada saat sebelum ada regulasi, kondisi perbankan di Indonesia sebagai berikut:

- Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas perbankan di Indonesia (hanya ada UU Nomor 13 tahun 1968).
  - KLBI kepada bank tertentu.
  - Bank banyak menanggung program pemerintah.
  - Instrument pasar uang terbatas.
  - Bank swasta sedikit.
  - Sulitnya pendirian bank baru (bank baru sedikit).
  - Persaingan antar bank yang tidak ketat (kemudahan bagi bank tertentu).
  - Posisi tawar – menawar bank lebih kuat dari nasabah.
  - Birokrasi bank rumit
  - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank rendah.
  - Mobilisasi dana masyarakat rendah.
- b. Kondisi perbankan Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum krisis ekonomi pada akhir tahun 1990.

Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini, cara yang

ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor riil dan moneter sebagai berikut:

- Adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum.
- Jumlah bank swasta bertambah banyak.
- Tingkat persaingan bank yang semakin kuat.
- Sertifikasi bank Indonesia dan surat berharga pasar uang.
- Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat.
- Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar.

c. Kondisi perbankan Indonesia pada masa krisis ekonomi.

Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti dan bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sehingga kondisi pada saat itu sebagai berikut:

- Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis,
- Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat,
- Adanya spread negative,
- Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru,
- Jumlah bank menurun.

d. Kondisi perbankan Indonesia pada saat sekarang ini.

- Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
- Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk :
  1. Lembaga penjamin simpanan (LPS)
  2. Lembaga pengawas perbankan yang independen.
  3. Otoritas jasa keuangan.

- Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi praktik-praktik perbankan yang lebih baik.
- Penyaluran dana masyarakat ke arah yang lebih mencerminkan bank sebagai perantara keuangan dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian.

## B. SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan dalam perekonomian modern memiliki sekurang-kurangnya tujuh fungsi pokok sebagai berikut:

### 1) Fungsi tabungan (*savings function*)

Menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misal obligasi, saham yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko relatif rendah yang kemudian akan digunakan untuk investasi dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup.

### 2) Fungsi Kekayaan (*wealth function*)

Menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan nilai aset yang dimiliki, sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Misal: membeli mobil dapat berkurang nilainya karena penyusutan dan memiliki risiko kerugian (dicuri, kebakaran, kecelakaan). Sebaliknya, obligasi, saham, dan instrumen keuangan lainnya, nilainya tidak akan berkurang karena berlalunya waktu dan bahkan memperoleh penghasilan dan risikonya relatif kecil.

### 3) Fungsi Kredit (*credit function*)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang (membeli rumah, mobil). Pengusaha menggunakan fasilitas kredit untuk membeli barang untuk tujuan produksi, membangun gedung, membeli mesin baru, membayar gaji karyawan, membayar dividen kepada pemegang saham dan memenuhi kewajiban pajaknya.

### 4) Fungsi Pembayaran (*payment function*)

Menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang dipergunakan sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*) antara lain: cek, giro, kartu kredit, kartu debit. Variasi jasa pembayaran: kliring, *phone banking*, *electronic banking*, *electronic fund transfer*. Kegiatan tersebut merupakan terobosan baru bagi untuk

meningkatkan *fee base income* yang sanget membantu bank dan menjadi sumber pendapatan operasional bank yang diandalkan untuk menutupi biaya-biaya.

5) Fungsi Likuiditas (*liquidity function*)

Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas dan uang tunai di pasar keuangan dengan risiko kecil. Pasar keuangan menyediakan likuiditas bagi penabung pemilik instrumen keuangan yang sedang membutuhkan uang tunai. Pada masyarakat modern, uang disimpan di bank dan merupakan instrumen keuangan yang memiliki sifat likuiditas yang sempurna. Uang dapat kapan saja dibelanjakan tanpa perlu dikonversi dalam bentuk apapun. Namun, uang yang disimpan di bank umumnya memberikan hasil yang sangat rendah dibandingkan dengan semua aset yang diperjualbelikan dalam sistem keuangan dan daya belinya akan terkikis oleh inflasi. Oleh karena itulah penabung umumnya memperkecil jumlah tabungannya dan memilih memegang instrumen keuangan yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi (*high yielding instruments*) misalnya, dalam bentuk instrumen berpendapatan tetap, seperti: Surat Utang Negara-Obligasi Negara (*Treasury Bond*) dan Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*), sampai mereka membutuhkan uang tersebut.

6) Fungsi Risiko (*risk function*)

Sistem keuangan memberikan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, risiko penghasilan/kerugian kepada semua unit usaha. Polis asuransi menawarkan pertanggungan terhadap kemungkinan hilangnya penghasilan. Perusahaan asuransi memberikan proteksi kepada pemegang polisnya terhadap kemungkinan timbulnya kerugian *personal and property risk*, seperti kesehatan, kehilangan/pencurian, kerusakan akibat petir, kecelakaan lalu lintas. Penjualan polis asuransi di pasar keuangan dimaksudkan untuk menawarkan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian tersebut.

7) Fungsi Kebijakan (*policy function*)

Menjadi suatu alat utama untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi. Misalnya dengan mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah kredit, pemerintah dapat mempengaruhi rencana belanja dan pinjaman masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan kerja, produksi, dan harga-harga.

## C. LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan asset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat-surat berarga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain: simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sering lembaga keuangan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) karena fungsi pokoknya melakukan intermediasi antara unit defisit dan unit surplus.

### 1. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

#### a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, simpanan dapat ditarik dari bank. Pihak bank akan mau menempatkan/menyalurkan dananya kepada debitor/masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, mengelola dana pinjaman dengan baik, mampu membayar pada saat jatuh tempo, dan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

#### b. *Agent of development*

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan

masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang.

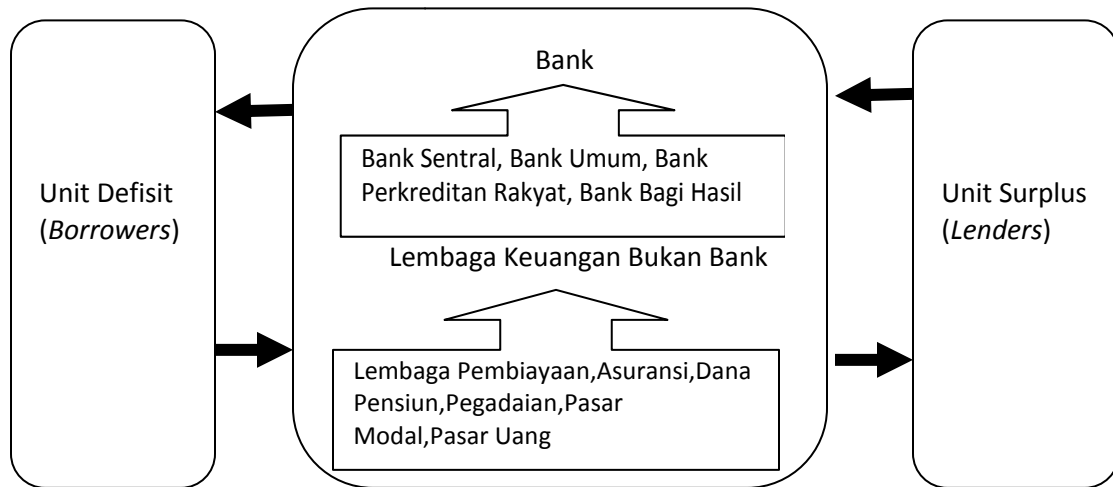
c. *Agent of services*

Memberikan jasa perbankan kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum misal: jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, penyelesaian tagihan.

## 2. Peran Lembaga Keuangan dalam Proses Intermediasi

Intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit (peminjam), yang terdiri dari sector usaha, pemerintah dan individu/rumah tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*). Pengalihan ini dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi.

Lembaga keuangan memiliki peran pokok dalam proses pengalihan dana dalam perekonomian. Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit. Sementara sekuritas sekunder dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana. Bagi penabung, simpanan tersebut merupakan aset finansial (*financial assets*), sedangkan bagi bank merupakan utang (*financial liabilities*). Selanjutnya, sekuritas sekunder tersebut dapat dialihkan menjadi aset finansial, misalnya dengan cara memberi pinjaman kepada unit defisit atau dengan membeli surat-surat berharga di pasar uang dan pasar modal.



**Gambar 1.1 Proses Transaksi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan sebagai berikut:

1). Pengalihan Aset (*asset transmutations*)

Lembaga keuangan depositori memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” oleh debitur. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah kredit yang diberikan kepada unit deficit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan peminjam. Lembaga keuangan dalam membiayai asset tersebut dananya diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung yang jangka waktunya dapat diatur menurut kebutuhan penabung. Lembaga keuangan pada dasarnya mengalihkan kewajibannya (*financial asset*) menjadi (*financial liabilities*) dengan janka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan nasabah penabung dan debitur. Proses pengalihan kewajiban fnansial oleh lembaga keuangan menjadi asset financial disebut *asset transmutation* (transmutasi kekayaan).

2). Realokasi pendapatan (*income realocation*)

Dalam kenyataannya, banyak individu memilik penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa kelak mereka akan pensiun sehingga penghasilannya otomatis akan berkurang. Untuk menghadapi masa-masa tersebut, mereka menyisihkan dan merelokasikan penghasilannya untuk persiapan menghadapi masa yang akan datang.

Untuk merelokasi penghasilan, mereka dapat membeli dan menyimpan barang, misalnya: rumah, tanah. Namun dengan memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan seperti: simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun, asset mereka akan jauh lebih likuid dibandingkan dengan alternatif pertama dan risiko kerugiannya juga relatif sangat kecil.

3). Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham) merupakan pengganti uang dan data digunakan sebagai alat pembayaran.

4). Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Dengan kata lain, lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas, dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas.

5). Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai *broker* adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini mereka hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara



peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga perantara keuangan menjadi penting untuk memecahkan masalah ini. Indonesia dengan pasar yang belum efisien, atau adanya informasi yang tidak sempurna, menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi akan menyebabkan Indonesia tidak dapat bersaing dalam pasar global. Terlihat disini lembaga perantara keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna.

### 3. Intermediasi dan Pengawasan

Fungsi lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan yang menghubungkan unit surplus dengan unit deficit. Hal ini berarti lembaga keuangan memungkinkan adanya aliran dana (aliran likuiditas) dari pemberi pinjaman (*lender*) atau deposan (*depositor*) atau unit surplus kepada peminjam (*borrower*) atau *entrepreneur* atau peminjam atau unit deposit. Posisi yang berbeda antara pemberi pinjaman dan peminjam menyebabkan informasi yang dimiliki masing-masing pihak tidak sama yang disebut kondisi informasi asimetris (*asymmetric information*).

Informasi asimetris membuka peluang bagi pihak yang lebih banyak memiliki informasi untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut dengan baik. Peluang untuk tidak mengungkapkan informasi ini menjadi menarik karena tindakan tersebut dapat membawa konsekuensi moneter yang menguntungkan. Implikasi dari informasi asimetris berupa pilihan untuk menyampaikan informasi tidak secara baik dalam rangka mendapatkan keuntungan moneter yang disebut *moral hazard* yang berarti adalah risiko penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat moneter. *Moral hazard* ini adalah masalah riil yang terjadi antara hubungan peminjam dan pemberi pinjaman, yang terbuka peluang munculnya inefisiensi di pasar uang karena informasi asimetris.

Untuk menurunkan atau meminimumkan dampak negative dari informasi asimetris ini berarti harus dilakukan dengan tindakan-tindakan tertentu. Permasalahan untuk merumuskan tindakan tertentu agar pihak yang memiliki informasi lebih banyak tidak menyalahgunakan keunggulan akses informasinya disebut dengan masalah insentif (*incentive problem*) yang kemudian menjadi masalah yang harus dipecahkan dalam hubungan peminjam dan pemberi pinjaman.

Solusi utama dari informasi asimetris adalah pengawasan (*monitoring*) oleh pihak deposan (*depositor*). Namun demikian pengawasan ini sulit dilaksanakan secara langsung oleh deposan, sehingga solusinya adalah dengan adanya delegasi pengawasan atau intermediasi oleh lembaga keuangan. Dengan adanya delegasi monitoring, diharapkan monitoring dilakukan oleh lembaga atau pihak yang memiliki kemampuan dan spesialisasi dalam bidang pengawasan, yaitu lembaga keuangan.

Apabila tidak dilakukan pengawasan atau intermediasi ditakutkan ada dua kemungkinan akan muncul. Dalam kondisi masyarakat yang memungkinkan informasi sebagai barang pribadi (*private*), maka kegiatan pengawasan akan dilakukan oleh semua pihak secara sendiri-sendiri atau terjadi duplikasi pengawasan. Kegiatan duplikasi pengawasan ini menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi sangat mahal secara individual maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, dalam kondisi masyarakat yang memungkinkan informasi sebagai barang public, muncul kemungkinan tidak ada pengawasan sama sekali. Karena tanpa campur tangan otoritas moneter, informasi hasil pengawasan akan menjadi milik bersama atau informasinya banyak dinikmati oleh penumpang gelap (*free-rider*), sehingga individu akan merasa rugi bila melakukan kegiatan pengawasan. Individu tidak terdorong melakukan kegiatan pengawasan karena kegiatan pengawasan memerlukan pengorbanan sumber daya atau biaya, dan di sisi lain yang menikmatinya adalah semua orang, sehingga individu yang akan melakukan pengawasan akan merasa dirugikan. Kegiatan pengawasan dalam kondisi demikian, hanya akan efektif bila dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini sama saja dengan delegasi pengawasan.

Perlu disadari bahwa tindakan delegasi pengawasan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan *rate of return* tertentu dari hasil penyaluran dana. Secara teoritis, permasalahan ini dapat dimodelkan berupa minimalisasi biaya delegasi pengawasan dan atau maksimisasi tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) bagi pengusaha (*entrepreneur*) dengan kendala tingkat pengembalian tertentu (*rate of return*) bagi peminjam.

#### **D. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API)**

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan

industry perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API.

Untuk merealisasikan pencapaian visi API, maka ditetapkan enam pilar API sebagai berikut:

- a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
- c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan terhadap risiko.
- d. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
- f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Jasa keuangan adalah salah satu industri yang mengalami perubahan dan pertumbuhan paling cepat di banyak negara. Sesuatu yang dianggap ideal pada suatu saat bisa dengan cepat

berubah pada waktu selanjutnya. Tantangan dalam dunia perbankan juga selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industry jasa keuangan secara umum. Di antara banyak tantangan yang saat ini paling dirasakan dalam dunia perbankan adalah tantangan untuk mengelola risiko dengan sebaik-baiknya. Bagi sistem perbankan di Indonesia, pengelolaan risiko dengan baik masih merupakan suatu yang baru.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dunia perbankan saat ini sebagai berikut:

a. Pertumbuhan kredit perbankan masih rendah

Visi API menunjukkan bahwa kondisi perbankan yang baik pada akhirnya ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang memerlukan pertumbuhan kredit yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya. Penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen risiko dan keahlian pokok perbankan relative masih lemah, dan biaya operasional yang relative tinggi. Hal ini merupakan tantangan

b. Struktur perbankan yang belum optimal

Perkembangan jumlah bank dan struktur perbankan Indonesia sejak tahun 1980-an bukan didasarkan pada suatu skema besar untuk mewujudkan struktur perbankan yang ideal. Struktur yang berkembang pada waktu tersebut cenderung disebabkan oleh reaksi alamiah terhadap perubahan regulasi dalam iklim perekonomian. Hal tersebut mengakibatkan struktur perbankan yang muncul bukanlah struktur yang ideal bagi penerapan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan fungsi intermediasi.

c. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang

Masih lemahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan sering terdengarnya keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit dan masih banyaknya praktik penyediaan jasa keuangan informal. Sejalan dengan perubahan social dan politik di masyarakat, mengingat masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya perbankan semakin menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan yang semakin tinggi dan berkualitas. Kualitas pelayanan tidak hanya menyangkut manfaat ekonomi dari

pelayanan jasa keuangan tetapi juga antisipasi terhadap efek samping dari peningkatan peran jaa perbankan, seperti kejahatan dan penipuan.

d. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan

Pengawasan bank merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa prinsip kehati-hatian yang belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM yang belum optimal, dan masih lemahnya pengawasan terkonsolidasi apalagi secara internasional.

e. Kapabilitas perbankan yang masih lemah

*Corporate governance* dan *core banking skills* merupakan ukuran yang dapat dijadikan pedoman untuk menyatakan masih lemahnya kapabilitas perbankan. Pentingnya prinsip kehati-hatian, termasuk di dalamnya pengelolaan risiko, semakin menunjukkan pentingnya penciptaan system pengendalian internal yang berkualitas dan tepat.

f. Profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan

Perekonomian selalu mengalami fluktuasi. Siklus usaha tidak hanya dirasakan pada investasi di sector riil saja tetapi juga sangat erat kaitannya dengan sector keuangan. Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan pada umumnya bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yang tidak mampu bertahan (*sustainable*). Profitabilitas dan efisiensi yang berkesinambungan memungkinkan bank mampu bertahan dan bahkan berkembang dalam menghadapi siklus bisnis.

g. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan

Landasan dari kegiatan usaha perbankan, dan juga jasa lembaga keuangan secara umum adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan fungsi intermediasi oleh bank tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam kaitannya dengan penciptaan kepercayaan, perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar yang jelas dalam bentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan.

h. Perkembangan teknologi informasi

Risiko pengelolaan lembaga keuangan semakin bervariasi dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Hal ini ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan semakin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Dengan adanya teknologi informasi, persaingan industry perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antarbank menjadi semakin ketat sehingga baik bank nasional maupun bank berskala lebih kecil juga harus mampu beroperasi dengan lebih efisien.